

# Polri Didesak Segera Tahan Eggi Sudjana

Kamis, 12 Oktober 2017 | 7:11

<http://sp.beritasatu.com/home/polri-didesak-segera-tahan-eggi-sudjana/120864>



Eggi Sudjana. [Beritasatu]

## Berita Terkait

- Mitra Hukum Minta Polisi Segera Proses Eggi Sudjana
- Korban Teror di Gereja Oikumene Samarinda Terima Kompensasi
- Pelajar SMA Ini Tantang Profesor Benahi Cara Mengajar di Sekolah
- Kasus Munarman Dinilai Lamban, KRB Datangi Polda Bali
- Intoleransi Tinggi Dampak Pembelajaran Toleransi Tanpa Praktik

[JAKARTA] Mabes Polri didesak segera menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan penghinaan terhadap agama selain agama Islam di Indonesia.

"Mabes Polri segera menetapkannya menjadi tersangka dan segera menahannya," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, kepada SP di Jakarta, Rabu (11/10).

Petrus menilai Mabes Polri lamban mengusut kasus dengan terlapor Eggi Sudjana ini. "Kenapa harus lamban ? Sudah jelas-jelas dia mengucapkan yang meresahkan dan melecehkan agama selain agama yang dianutnya," kata dia.

Sebagai bukti Polri lamban, kata Petrus, adalah sampai saat ini Mabes Polri belum melakukan cegah dan tangkal (cekal) Eggi untuk bepergian ke luar negeri. "Polri harus ambil pelajaran atas kasus dugaan tindak pidana perbuatan asusila dengan tersangka Habib Rizieq Shihab yang sudah kabur ke luar negeri dan sampai saat ini belum juga kembali ke Tanah Air," kata Petrus.

Sebagaimana diberitakan, video wawancara Eggi Sudjana dengan wartawan yang menyebut agama Kristen, Hindu, dan Budha bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan kembali menjadi viral di media sosial beberapa hari ini.

Wawancara tersebut dilakukan Senin, 18 September 2017. Namun wawancara kontroversial Eggi ini terus menggelinding dan menjadi viral. Video ini sudah dikomentari lebih dari 8.500 kali dan dibagikan lebih dari 5.500 kali.

Mengutip situs mahkamahkonstitusi.go.id, awalnya Eggi Sudjana mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) ke MK.

Dalam sidang di MK, Eggi berpendapat, jika Perppu Ormas tetap diberlakukan, maka pemerintah harus konsisten menjalankan aturan tersebut. "Kalau ini tetap diberlakukan atau paling tidak Mahkamah berpendapat Perppu ini benar dan harus jalan, kami minta konsistensinya, bubarkan ormas lain yang bertentangan dengan Pancasila," kata Eggi.

Menurut Eggi, asas Ketuhanan Yang Maha Esa hanya ada dalam ajaran Islam. "Pemahaman kami dan juga pemahaman dunia dalam arti agama-agama yang lain, sepengetahuan kami yang ber-Ketuhanan Maha Esa itu hanya ajaran Islam," kata Eggi.

Oleh karena itu, lanjut Eggi, hal ini akan mengganggu ormas agama selain Islam, karena konsekuensinya harus dibubarkan. "Jadi, kalau Perppu ini diberlakukan, keberatan kita-nya adalah justru mengganggu kepada agama lain yang bukan Islam, karena pasti harus dibubarkan juga," kata dia.

Menurut Petrus, laporan masyarakat yang begitu banyak di berbagai wilayah hukum Polri di Indonesia, menjadi bukti bahwa akal sehat publik masih tetap terjaga dan Polri makin mendapat kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat. "Jangan lamban merespons laporan masyarakat. Jangan menunggu unjuk rasa yang berjilid-jilid baru merespons," tegas Petrus. [E-8]